

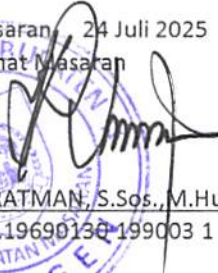
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Masaran Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Kecamatan Masaran 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dengan mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi daerah yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan sebagai pedoman dalam Menyusun rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan RKA Kecamatan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, serta dapat memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, serta sebagai alat kontrol dan tolok ukur dalam pengendalian, evaluasi kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Masaran, 24 Juli 2025
Camat Masaran

SURATMAN, S.Sos., M.Hum.
NIP.19690130-199003 1 005



-PerubahanRenjaKecamatanMasaran2025-i

DAFTAR ISI

BAB I1

PENDAHULUAN.....1

 Latar Belakang1

 Landasan Hukum.....2

 Maksud dan Tujuan3

 Sistematika Penulisan4

BAB II5

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II TAHUN 20255

 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 20255

 Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 16

BAB III.....24

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....24

 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah24

BAB IV.....31

PENUTUP31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I
 Tahun 2025 6

Tabel 2.2 Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Sragen
 13

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
 2025 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Masaran tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun pertama dari Renstra Kecamatan Masaran Tahun 2021-2026 serta RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah “Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup”,”. Tema ini menjadi acuan Kecamatan Masaran dalam penyusunan prioritas kegiatan tahun 2025.

Sesuai amanat pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah maupun rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Perubahan Renja Kecamatan Masaran Tahun 2025 disusun untuk penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan berikut serta alokasi beberapa rekening belanja menyesuaikan kebutuhan riil pada tahun berjalan. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Masaran sampai dengan triwulan I tahun berjalan yaitu tahun 2025. Perubahan dokumen Renja ini disusun melalui proses pembentukan tim penyusun perubahan Renja tahun 2025, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan, penyusunan rancangan perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kecamatan Masaran tahun 2021-2026 dan rancangan awal perubahan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025, serta penetapan rancangan perubahan Renja menjadi perubahan Renja Kecamatan Masaran tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Masaran Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) perubahan Kecamatan Masaran tahun 2025 dengan memperhatikan kemungkinan permasalahan yang timbul dan berkembang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

Kecamatan Masaran sesuai indikator kinerja utama Kecamatan, yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan dan meningkatkan kinerja kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap target kinerja, indikator dan anggaran pada program, kegiatan, sub kegiatan sesuai aturan dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pengawasan;

- 3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dalam mencapai tujuan organisasi; dan
- 4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun 2025 ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sesuai dengan yang ditetapkan. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Masaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat Tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2025. Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Masaran Tahun 2025 Triwulan II telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja 2025 pada Triwulan I telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

**Hasil Renja OPD Kecamatan Masaran Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan II**

No	Indikator	Target RKPD Th. 2025	Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83,88			-
2	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	64 (B)	67,75 (B)	Tercapai	-

Selanjutnya, rincian realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Kecamatan *Masaran* tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat ditampilkan dalam tabel halaman berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Tahun2025 Kecamatan Masaran
Kabupaten Sragen

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja			Satuan		Target		Capaian		Faktor	Tindak Lanjut
1	IKM Kecamatan			Angka		83,7		88,25		[Pendorong] Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai	Pertahankan dan tingkatkan
2	Nilai LKjIP Kecamatan			Angka		63		63,60		[Pendorong] komitmen pimpinan dan seluruh pegawai	pertahankan dan tingkatkan
Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						0,00	54,99				
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						0,00					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						72,22					
Kecamatan Masaran											
7		UNSUR KEWILAYAHAN			3.605.298.462		1.982.581.973		54,99		
7.01		KECAMATAN			3.605.298.462		1.982.581.973		54,99		
7.01.01	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Sesuai Ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi [undefined]	0,00	2.573.703.362	0,00	1.174.306.473	0,00	45,63		
7.01.01.2,02	Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang Tercukupi [undefined]	0,00	2.265.635.312	0,00	1.081.001.400	0,00	47,71		

7.01.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	16,00	2.265.635.312	16,00	1.081.001.400	100,00	47,71	[TW2 - Pendorong] Pencairan gaji dan TPP dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan gaji dan TPP dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,06	Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang Tercukupi [undefined]	0,00	144.894.600	0,00	50.975.000	0,00	35,18		
7.01.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	3.838.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW2 - Penghambat] Kegiatan direncanakan di triwulan 3	[TW3] Kegiatan direncanakan di triwulan 3
7.01.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	102.786.600	1,00	40.125.000	100,00	39,04	[TW2 - Pendorong] Pencairan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	19.110.000	1,00	6.265.000	100,00	32,78	[TW2 - Pendorong] Pencairan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1,00	14.960.000	1,00	4.585.000	100,00	30,65	[TW2 - Pendorong] Pencairan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	12,00	1.700.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW2 - Penghambat] Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum dicairkan	[TW3] Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum dicairkan
7.01.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	4,00	2.500.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW2 - Penghambat] Kegiatan dinas luar menyesuaikan kebutuhan/undangan	[TW3] Kegiatan dinas luar menyesuaikan kebutuhan/undangan
7.01.01.2,08	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Perkantoran [undefined]	0,00	73.671.000	0,00	24.884.753	0,00	33,78		

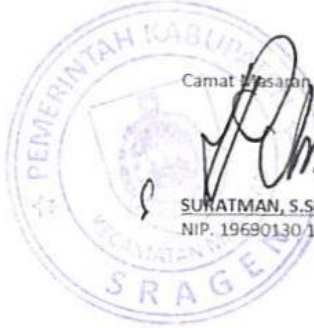
7.01.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12,00	38.400.000	4,00	11.093.753	33,33	28,89	[TW2 - Pendorong] Pencairan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	1,00	4.295.000	1,00	1.950.000	100,00	45,40	[TW2 - Pendorong] Pencairan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	1,00	30.976.000	1,00	11.841.000	100,00	38,23	[TW2 - Pendorong] Pencairan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [undefined]	0,00	89.502.450	0,00	17.445.320	0,00	19,49		
7.01.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	18,00	62.420.000	6,00	17.445.320	33,33	27,95	[TW2 - Pendorong] Pencairan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.01.2,09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	2,00	2.408.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW2 - Penghambat] Kegiatan direncanakan di triwulan 3	[TW3] Kegiatan direncanakan di triwulan 3
7.01.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	2,00	24.674.450	0,00	0	0,00	0,00	[TW2 - Penghambat] Kegiatan direncanakan di triwulan 3	[TW3] Kegiatan direncanakan di triwulan 3
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	45,63	0,00	45,63		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		

7.01.02	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan [%]	100,00	88.751.000	0,00	47.787.000	0,00	53,84		
7.01.02.2,01	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kecamatan [undefined]	0,00	5.943.000	0,00	5.943.000	0,00	100,00		
7.01.02.2,01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [Laporan]	12,00	5.943.000	12,00	5.943.000	100,00	100,00	[TW2 - Pendorong] Pencairan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
7.01.02.2,04	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pemeliharaan jalan raya sukowati wilayah Masaran [undefined]	0,00	82.808.000	0,00	41.844.000	0,00	50,53		
7.01.02.2,04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [Laporan]	12,00	82.808.000	6,00	41.844.000	50,00	50,53	[TW2 - Pendorong] Pencairan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	53,84	0,00	53,84		
Predikat kinerja						SR	R	SR	R		
7.01.03	Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai Ketentuan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif [%]	100,00	11.515.000	0,00	5.740.000	0,00	49,85		

7.01.03.2,01	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif [undefined]	0,00	11.515.000	0,00	5.740.000	0,00	49,85		
7.01.03.2,01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan [Laporan]	12,00	11.515.000	6,00	5.740.000	50,00	49,85	[TW2 - Pendorong]Pencairan pelaksanaan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3]Pencairan pelaksanaan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	49,85	0,00	49,85		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
7.01.04	Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Ketentuan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian [%]	100,00	25.140.000	0,00	5.250.000	0,00	20,88		
7.01.04.2,01	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian [undefined]	0,00	25.140.000	0,00	5.250.000	0,00	20,88		
7.01.04.2,01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [Laporan]	12,00	25.140.000	3,00	5.250.000	25,00	20,88	[TW2 - Pendorong]Pencairan pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikaol di wilayah kecamatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3]Pencairan pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikaol di wilayah kecamatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	20,88	0,00	20,88		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
7.01.05	Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik [%]	100,00	895.000.300	0,00	749.498.500	0,00	83,74		

7.01.05.2,01	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum [undefined]	0,00	895.000.300	0,00	749.498.500	0,00	83,74		
7.01.05.2,01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [Orang]	2.678,00	884.997.300	2.100,00	749.498.500	78,42	84,69	[TW2 - Pendorong] Pencairan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan	[TW3] Pencairan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan

7.01.05.2,01.000 3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa [Orang]	350,00	10.003.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW2 - Penghambat] Kegiatan direncanakan di triwulan 3	[TW3] Kegiatan direncanakan di triwulan 3
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	83,74	0,00	83,74		
Predikat kinerja						SR	T	SR	T		
7.01.06	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu [%]	100,00	11.188.800	0,00	0	0,00	0,00		
7.01.06.2,01	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa Tepat Waktu [undefined]	0,00	11.188.800	0,00	0	0,00	0,00		
7.01.06.2,01.000 2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa [Dokumen]	1,00	11.188.800	0,00	0	0,00	0,00	[TW2 - Penghambat] Kegiatan direncanakan di triwulan 4	[TW3] Kegiatan direncanakan di triwulan 4
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00				
Predikat kinerja						SR	SR				



 Camat Masaran



 SURATMAN, S.Sos., M.Hum.

 NIP. 196901301990031005

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan capaian kinerja belum maksimal, diantaranya:

1. Beberapa sub kegiatan pelaksanaan kegiatan ada ditriwulan III dan triwulan IV;
2. Terdapat sub kegiatan yang sudah dilaksanakan ditriwulan II tetapi untuk pencairan anggaran dicairkan di triwulan III;

Sedangkan untuk faktor pendorong yang menyebabkan capaian kinerja sudah maksimal, diantaranya :

1. Target rencana kinerja sudah sesuai dengan target perencanaan kinerja;
2. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal kegiatan

2.2. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinarja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUANDAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran,TipePenghitungandanSumberData)
1	2	3	4
1.	Meningkatkanmutupelayananpublikdikecamatan		
1.1.	Meningkatnyakualitas danakses pelayanan public diKecamatan	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• AlasanPemilihanIndikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • FormulasiPengukuran: Surveykepuasanmasyarakat • TipePerhitungan: NonKomulatif • SumbeData: Kecamatan
2.	Meningkatkankinerjakecamatan		
2.1.	Sasaran Strategis : Terpenuhinya akses layanan kecamatan di seluruh desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	100 persen

2.2.	Meningkatnyakerja kecamatan	1)Predikat LKjIP	• AlasanPemilihanIndikator: • Indikator ini dipilihuntuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • FormulasiPengukuran: HasilReviewLKjIPolehInspektorat • TipePerhitungan: • NonKomulatif.
------	--------------------------------	---------------------	--

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah telah ditentukan dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen periode 2021-2026. Oleh karenanya, perubahan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dimaksud dalam bab ini lebih mengarah pada perubahan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Perubahan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Masaran di tahun 2025 ini dikarenakan adanya beberapa alasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
2. Penyesuaian Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

Secara lebih detil, terkait penyesuaian sub kegiatan dan jumlah anggarannya dapat ditampilkan dalam tabel perubahan kinerja pelayanan Perangkat daerah Tahun 2025 di halaman berikut.

Tabel II.2

Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Sragen

NO	RENJA 2025					PERUBAHAN RENJA 2025					Keterangan
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Masaran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap bulan	100%	2.676.203.362	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Masaran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap bulan	100%	2.573.703.362	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Masaran	Persentase administrasi keuangan tercukupi	100%	2.365.635.312	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Masaran	Persentase administrasi keuangan tercukupi	100%	2.265.635.312	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Masaran	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	2.365.635.312	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Masaran	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.265.635.312	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Masaran	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	100%	147.394.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mondokavn	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	100%	144.894.600	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	3.838.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	3.838.000	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 paket	102.786.600	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah paket peralatan Dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 paket	102.786.600	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.110.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.110.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Masaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket	14.960.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Masaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket	14.960.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Masaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.700.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Masaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Masaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	5.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Masaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	2.500.000	Penyesuaian indikator, target dan anggaran (berkurang)
1.c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Masaran	Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang terpenuhi	100 %	73.671.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Masaran	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	73.671.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	38.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	38.400.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	4.295.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	4.295.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.976.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.976.000	

1.d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Masaran	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	89.502.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Masaran	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	89.502.450	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Masaran	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	18 unit	62.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Masaran	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	18 unit	62.420.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Masaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2.408.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Masaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2.408.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Masaran	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	24.674.450	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Masaran	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	24.674.450	
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Masaran	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	88.751.000	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Masaran	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	88.751.000	
2.a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Kecamatan Masaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	100 %	5.943.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Kecamatan Masaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	100 %	5.943.000	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Masaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	5.943.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Masaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	5.943.000	
2.a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Masaran	Prosentase Pemeliharaan Jalan raya Sukowati Wilayah Masaran	100 %	82.808.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Masaran	Prosentase Pemeliharaan Jalan raya Sukowati Wilayah Masaran	100 %	82.808.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	82.808.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	82.808.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Masaran	Persentase lembaga desa yang aktif	100%	118.093.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Masaran	Persentase lembaga desa yang aktif	100%	11.515.000	
3.a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Masaran	Jumlah PKK Desa yang aktif	100 %	118.093.000	KoordinasiKegiatan PemberdayaanDesa	Kecamatan Masaran	JumlahPKKDesa yang aktif	100 %	11.515.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Masaran	Laporan Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	118.093.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Masaran	Laporan Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	11.515.000	Penyesuaian indikator, target dan anggaran (berkurang)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Masaran	Persentase penanganan laporan kejadian	100%	25.140.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Masaran	Persentase penanganan laporan kejadian	100%	25.140.000	
4.a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Masaran	Persentase tercapainya lingkungan yang aman	100%	25.140.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Masaran	Persentase tercapainya lingkungan yang aman	100%	25.140.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	25.140.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Masaran	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	25.140.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Masaran	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	765.001.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Masaran	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	895.000.300	
5.a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Masaran	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %	765.001.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Masaran	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	884.997.300	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Masaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2100 orang	754.998.500	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Masaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2100 orang	884.997.300	

			Ketahanan Nasional								
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Masaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 orang	10.003.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Masaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 orang	10.003.000	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Masaran	Persentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu	100%	11.188.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Masaran	Persentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu	100%	11.188.800	
6.a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Masaran	Prosentase Desa yang mendapat fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	11.188.800	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Masaran	Prosentase Desa yang mendapat fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	11.188.800	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Masaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.188.800	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Masaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.188.800	
	JUMLAH				3.684.377.662					3.605.298.462	

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam perubahan Renja tahun 2025 ada beberapa penyesuaian terkait sub kegiatan, indikator, target dan jumlah pagu anggaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Masaran tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan.

Sesuai karakteristik Kecamatan sebagai perangkat daerah unsur kewilayahan dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat rutin dan berkelanjutan, maka pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Masaran sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun 2025. Selanjutnya, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator dan target kinerja serta pagu indikatif kebutuhan dananya dapat ditampilkan dalam tabel lembar berikut.

Tabel 3.1

**Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sragen**

KECAMATAN MASARAN

No.Urut					Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kecamatan Masaran										3.605.298.462	3.779.404.431		
7					UNSUR KEWILAYAHAN										3.605.298.462	3.779.404.431		
7	01				KECAMATAN										3.605.298.462	3.779.404.431		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	100 %					2.573.703.362	2.625.177.429		Camat
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Administrasi Keuangan yang Tercukupi	100 %					2.265.635.312	2.310.948.018		Sekcam
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang /bulan	2.265.635.312	2.310.948.018		KasubbagPEP
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Administrasi Umum yang Tercukupi	100 %					144.894.600	147.792.492		Sekcam

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.838.000	3.914.760	KasubbagUmpeg
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.786.600	104.842.332	KasubbagUmpeg
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.110.000	19.492.200	KasubbagUmpeg
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.960.000	15.259.200	KasubbagUmpeg
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.700.000	1.734.000	KasubbagUmpeg
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	2.500.000	2.550.000	KasubbagUmpeg
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan				73.671.000	75.144.420	Sekcam
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.400.000	39.168.000	KasubbagUmpeg

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.295.000	4.380.900	KasubbagUm peg
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.976.000	31.595.520	KasubbagUm peg
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					89.502.450	91.299.777	Sekcam
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	62.420.000	63.668.400	KasubbagUm peg
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.408.000	2.456.160	KasubbagUm peg
7	01	01	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Pemeliharaan/re habilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	24.674.450	25.175.217	KasubbagUm peg
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Masaran	Kec. Masaran	Prosentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	100 %					88.751.000	90.526.020	Camat
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan		Kec. Masaran	Kec. Masaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	1 laporan					5.943.000	6.061.860	Sekcam

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan			Jumlah Laporan Koordinasi/ Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	5.943.000	6.061.860	KasiEkbang
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Pemeliharaan Jalan raya SukowatiWilayah Masaran	100 %					82.808.000	84.464.160	KasiYanum
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	12 laporan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	12 Laporan	82.808.000	84.464.160	KasiYanu m
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Lembaga Desa Yang Aktif	100 %					11.515.000	11.745.300	Camat
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Masaran	Kec. Masaran	Prosentase Lembaga Desa Yang Aktif	100 %					11.515.000	11.745.300	Sekcam
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 Laporan	11.515.000	11.745.300	KasiKesr a
7	01	04			PROGRAM KOORDINAS IKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100 %					25.140.000	25.642.800	Camat
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100 %					25.140.000	25.642.800	Sekcam

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.140.000	25.642.800		KasiTrantib
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasikan Dengan Baik	100 %					895.000.300	912.900.306		Camat
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		Kec.Masaran	Kec.Masaran	<i>Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasikan Dengan Baik</i>	100 %					895.000.300	912.900.306		<i>Sekcam</i>
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	2100 orang			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2100 orang	884.997.300	902.697.246		KasiTrantib
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 orang			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 Orang	10.003.000	10.203.060		KasiTrantib

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Desa Yang Menyelesaikan RKP Desa dan APB. Desa Tepat Waktu	100 %					11.188.800	11.412.576		Camat
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Prosentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	1 Dokumen					11.188.800	11.412.576		Sekcam
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kec.Masaran	Kec.Masaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.188.800	11.412.576		KasiPem
JUMLAH TOTAL															3.605.298.462	3.779.404.431		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu Perubahan Renja juga berfungsi meninjau Kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Perubahan Renja Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sragen tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Masaran sebagai Upaya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan telah menyusun rencana strategis Kecamatan Masaran tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Kecamatan Masaran juga menyusun rencana kerja (Renja) 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025.

Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya Perubahan Renja Kecamatan Masaran tahun 2025. Situasi dan kondisi itu diantaranya penyesuaian standar harga, maupun penyesuaian sub kegiatan agar relevan dengan kondisi terkini di Kecamatan Masaran. Selain itu, dokumen perubahan Renja 2025 ini juga dalam rangka menyelaraskan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026, Renstra Kecamatan Masaran 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasikan, terintegrasi dan sinergis. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Masaran sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Perubahan Renja Tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sragen.

Masaran, 24 Juli 2025
Camat Masaran

SURATMAN, S.Sos., M.Hum.
NIP.19690130 199003 1 005





KEPUTUSAN CAMAT

**KEPUTUSAN CAMAT MASARAN
NOMOR : 800/ 358 /30/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MASARAN TAHUN 2025**

CAMAT MASARAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Masaran Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

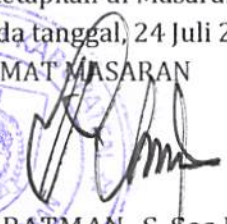
- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Perubahan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Masaran Tahun 2025;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Kecamatan Masaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Camat Masaran ini.
- KETIGA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
1. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan dokumen: rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir rencana kerja Kecamatan Masaran Tahun 2025;

2. menyampaikan dokumen rencana kerja Kecamatan Masaran tahun tahun 2025 sebagaimana poin 1 kepada Tim Teknis verifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen;
3. menindaklanjuti hasil verifikasi pada poin 2, sebelum dilakukan pengesahan Camat Masaran.

KEEMPAT : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Masaran.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Masaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Camat Masaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masaran,
Pada tanggal, 24 Juli 2025
CAMAT MASARAN

SURATMAN, S., Sos.M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 19690130 199003 1 005

Salinan disampaikan kepada:

1. Bappedarida kabupaten Sragen;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Sragen;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MASARAN
NOMOR: 800/ /30/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MASARAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERUBAHAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
KERJA KECAMATAN MASARAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suratman, S.Sos.M.Hum.	Camat Masaran	Ketua
2.	Yoga Sumantri, S.E.	Sekretaris Kecamatan Masaran	Sekretaris
3.	Agus Darmanto, S.M.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	Anggota
4.	Martani Setyawati, S.E.,M.Si.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
5.	Agus Priyono, S.Sos.,M.M.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Suratno, S.Kom.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7	Sri Handayani, S.Pd.	Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
8.	Agus Priyono, S.Sos.,M.M.	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
9.	Yandi Setiawan, S.E.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Masaran,
Pada tanggal 3 Juli 2025
CAMAT MASARAN

SURATMAN, S.Sos.M.Hum.
Penyusun Tk I
NIP. 19690130 199003 1 005